



Tahun Anggaran

2025

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan

BPPKAD-TA.2025

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Perubahan BPPKAD Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPPKAD Tahun 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

PROBOLINGGO, **Juni 2025**
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199302 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 1

BAB I PENDAHULUAN.....2

1.1 Latar Belakang.....2

1.2 Landasan Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan.....4

1.4 Sistematik Penulisan.....4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025.....6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 62

BAB IV PENUTUP 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi hasil pelaksanaan renja bppkad kabupaten probolinggo s/d triwulan II tahun anggaran 2025.....1

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Kinerja Utama.....19

Tabel 2.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan 79

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disesuaikan pada pertengahan tahun anggaran berjalan guna mengoptimalkan pencapaian target tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama BPPKAD, dengan memperhatikan perubahan kondisi yang terjadi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk evaluasi kinerja pelaksanaan Renja sebelumnya, perubahan prioritas pembangunan, serta perubahan kebijakan dan peraturan yang relevan. Kondisi internal (misalnya sumber daya manusia, anggaran) dan eksternal (misalnya ekonomi, sosial, lingkungan) dapat mengalami perubahan. Renja Perubahan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Renja Perubahan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah. Ini dapat dicapai melalui penyesuaian yang tepat pada program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2023 Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi dasar serta acuan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dokumen Renstra. Dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran di RKPD perubahan Kabupaten Probolinggo dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPPKAD tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

- c. Peningkatan pengelolaan barang milik daerah (BMD)
- d. Penyesuaian ketersediaan cadangan dana tidak terduga (BTT) dalam rangka untuk melindungi keuangan dari risiko utang dan menjaga stabilitas finansial saat menghadapi keadaan yang tidak terencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 BPPKAD Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari

- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan,
- 1.4 dan sistematika penulisan.

BAB II :EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun lalu 2025 sampai dengan Triwulan II (Juni 2025) analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan II dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Keuangan BPPKAD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dari rata-rata indikator capaian kinerja sampai dengan triwulan II tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo masih belum mencapai target maksimal, karena beberapa pelaksanaan kegiatan ada di triwulan 3 dan 4 tahun anggaran 2025.

Rincian realisasi program/kegiatan BPPKAD dapat dilihat pada format tabel berikut ini:

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO
S/D TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM (PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN (Refocusing) 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025 (%)	
			KINERJA (K)	ANGGARAN (RP)	KINERJA (K)	REALISASI (RP)	KINERJA (K)	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5				
	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET SAERAH			548.301.473.252		294.724.484.659		53.75
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	1%	26.960.770.417	0%	9.851.953.973	0%	36%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100%	415.213.266	50 %	195.438.706	50%	47%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	402.683.266	4 Dokumen	195.438.706	57%	48%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	8.450.000	2 Dokumen	0	66%	66%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	4.080.000	6 Laporan	0	50%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100%	20.551.721.289	50%	6.950.508.603	50%	33%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900	20.532.821.289	450	6.949.728.603	50%	33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP	12 laporan	18.900.000	4 laporan	780.000	33%	4%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	106.810.000	0%	3.160.000	0%	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 paket	69.300.000	0 paket	0	2.9%	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 org	37.510.000	0 org	3.160.000	0%	8.4%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100%	479.960.456	50.00 %	76.191.475	50%	15%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	14.987.400	0 paket	0	0%	0%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 paket	87.415.800	7 paket	5.394.600	41%	6%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	20.332.000	0 paket	0	0%	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	43.900.000	40 paket	16.421.292	400%	37%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	86.799.510	0 paket	0	0%	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 laporan	34.440.000	40 laporan	13.440.000	285%	39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 laporan	157.085.746	27 laporan	40.935.583	23%	71%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	35.000.000	0 dokumen	0	0%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	1.750.779.350	74 %	1.310.995.132	74%	74%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	280.000.000	1 unit	257.100.000	33%	91%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	0	0 unit	0	0%	0%

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	588.020.100	2 unit	415.437.702	100%	70%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	882.759.250	1 unit	638.457.430	100%	72%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.620.510.156	36 %	968.656.791	36%	36%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	27.752.800	6 laporan	5.280.000	50%	19%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	11.692.080	5 laporan	541.488	41%	4%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	2.581.065.276	37 Laporan	962.835.303	462%	37%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	100 %	1.035.775.900	33 %	347.003.266	33%	33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	626.120.000	16 unit	318.452.766	51%	50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	98.500.000	6 unit	9.969.500	75%	10%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	86.155.900	12 unit	18.581.000	85%	21%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	225.000.000	2 unit	0	200%	0%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (dimensi 2, 3 dan 4 IPKD)		516..143.595.860		283.397.389.734		54%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD (tepat waktu)	100%	851.415.590	50%	75.246.500	50%	8%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	141.700.325	0 dokumen	1.717.000	0%	1%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	156.841.747	2 dokumen	6.006.000	100%	38%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	245.982.638	0 dokumen	20.960.000	0%	8.5%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	119.646.630	0 dokumen	30.768.500	0%	25%

	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 dokumen	187.244.250	1 dokumen	15.795.000	20%	8.4%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan APBD	94.2%	610.541.700	41.50%	191.091.200	41.50%	31%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	57.303.500	4 dokumen	11.467.000	33%	20%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220 dokumen	22.640.400	53 dokumen	10.293.700	24%	45%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2 laporan	62.533.000	1 laporan	11.700.000	50%	18%

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	211.572.000	3 dokumen	86.422.500	25%	40%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 dokumen	80.220.200	1 dokumen	57.700.000	33%	71%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162 org	166.272.600	54 org	13.508.000	33%	8.1%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100%	664.887.570	55%	298.520.832	55%	44%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	87 dokumen	106.400.000	87 dokumen	39.223.000	100%	36%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	178.029.500	0 dokumen	0	0%	0%

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6 laporan	123.434.570	6 laporan	73.400.000	100%	59%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 dokumen	257.023.500	7 dokumen	185.897.832	70%	72%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100%	514.016.751.000	50%	282.832.531.202	50%	55%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325 laporan	486.069.096.000	38 laporan	264.381.916.769	11%	54%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	9.522.000.000	2 laporan	9.237.786.773	200%	97%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	18.425.655.000	12 laporan	9.212.827.660	1200%	50%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Prosentase SKPD Yang Tertib Pengelolaan BMD Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	84%	2.544.573.475	50%	1.290.966.443	50%	50%

	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Prosentase SKPD Yang Tertib Pengelolaan BMD Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	84%	2.544.573.475	50%	1.290.966.443	50%	50%
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	123.101.000	1 dokumen	103.813.500	100%	84%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87 dokumen	22.615.000	87 dokumen	5.283.000	100%	23%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	261 laporan	562.768.125	87 laporan	225.267.120	33%	40%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87 laporan	55.606.000	87 laporan	8.720.000	100%	15%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 laporan	1.089.984.350	275 laporan	649.345.263	55%	59%
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 laporan	560.952.500	2 laporan	200.613.900	50%	35%

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	129.546.500	3 dokumen	97.923.660	50%	75%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1.4 %	2.652.533.500	46.01 %	184.174.509	46.01 %	6.94%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1.4 %	2.652.533.500	46.01 %	184.174.509	46.01%	6.94%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	13 unit	507.722.000	3 Unit	57.315.000	23 %	11 %
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	503 laporan	183.104.700	201 aporan	13.581.903	39 %	7%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	52 objek pajak	284.057.400	18 obyek pajak	6.000.000	34 %	2 %
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5000 dokumen	265.476.400	2000 dokumen	29.462.000	40 %	11 %
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	429.384.000	3 layanan	7.685.000	25 %	1 %

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5000 dokumen	73.050.000	2000 dokumen	300.000	40 %	0.41%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	102 dokumen	727.190.000	40 dokumen	63.407.606	39 %	8 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	47 laporan	182.549.000	0 dokumen	6.423.000	0 %	3%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan peraturan tersebut, BPPKAD Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024 memiliki indikator dan target kinerja yang berbeda. Sehingga Perubahan tersebut berimbas kepada RENSTRA OPD.

Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan II, dengan indikator kinerja utama (IKU), sbb ;

1. Meningkatkan tatakelola birokrasi perangkat daerah, dengan indikator sbb;

a. Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah

Pencapaian target kinerja pada indikator LHE AKIP TA 2025 belum ada penilaian. Hal ini karena penilaian dilakukan pada bulan maret tahun berikutnya.

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan indikator sbb;

a. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Target kinerja pada indikator pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebesar 20 (indek). Pencapaian sd triwulan II mencapai 15 (Indek) atau sebesar 75%.

b. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indek transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 13.45 (indek) per tahun. Pencapaian sd triwulan II mencapai 6.21 (Indek) atau sebesar 46.15%

c. Indeks Penyerapan Anggaran APBD:

Indek penyerapan anggaran APBD dengan target sebesar 17.14 (indek). Pencapaian sd triwulan II mencapai 2.22 (Indek) atau sebesar 12.97%

3. Meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah, dengan indikator sbb;

a. Indeks Kemandirian keuangan.

Indek kemandirian keuangan dengan target sebesar 13.00 (indek) per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar 9.26 (indek) atau sebesar 71.26%.

b. Indeks Fleksibilitas Keuangan.

Indeks fleksibilitas keuangan dengan target sebesar 2.20 (indek) per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar 0,2 (indek) atau sebesar 8.85%.

c. Indeks Solvabilitas Layanan.

Indeks solvabilitas keuangan dengan target sebesar Rp. 2.200.000,- per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar Rp. 4.640.992/org, atau sebesar 210,95%.

Dilihat dari rata-rata ketiga capaian indikator capaian kinerja sampai dengan triwulan II tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo masih belum mencapai target maksimal.

Indikator dan capaian kinerja BPPKAD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
REALISASI CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II (Juni 2025)

NO	SASARAN KINERJA	Indikator Tujuan/Sasaran Kinerja	Target Kinerja Renja			
			Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Progres Realisasi
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan tatakelola birokrasi perangkat daerah	Presentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah	%	1	0	0 %
2	Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indek Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Dimensi 2 IPKD)	Indek	20	20	75 %
		Indek Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah (Dimensi 3 IPKD)	Indek	13.45	12,41	53.84 %
		Indek Penyerapan Anggaran APBD (Dimensi 4 IPKD)	Indek	17.14	14,29	25.93 %
3	Meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah	Indek Kemandirian keuangan (Dimensi 5 IPKD)	Indek	13.00	12,50	119.36 %
		Indek Fleksibilitas Keuangan (Dimensi 5 IPKD)	Indek	2.20	2,10	95.30 %
		Indek Solvabilitas Layanan (Dimensi 5 IPKD)	Rp/org	2.200.000	2.301.247	104.60 %

Dari tabel capaian kinerja utama BPPKAD sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025 diatas, dapat dijelaskan sbb ;

1. **Meningkatkan tatakelola birokrasi perangkat daerah, dengan indikator sbb;**
 - a. Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah
Pencapaian target kinerja pada indikator LHE AKIP TA 2025 belum ada penilaian. Hal ini karena penilaian dilakukan pada bulan maret tahun berikutnya.
2. **Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan indikator sbb;**
 - a. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
Target kinerja pada indikator pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebesar 20 (indek). Pencapaian sd triwulan II mencapai 15 (Indek) atau sebesar 75%. Capaian tidak mencapai 100% karena alokasi APBD untuk bidang infrastruktur belum mencapai 40% dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
 - b. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 13.45 (indek) per tahun. Pencapaian sd triwulan II mencapai 6.21 (Indek) atau sebesar 46.15%. Pencapaian ini masih belum maksimal, karena dokumen pengelolaan keuangan sebanyak 29 dokumen belum semua di publikasikan. Dokumen yang belum di publikasikan adalah dokumen tentang Laporan realisasi pengelolaan keuangan daerah yang terbit ditahun berikutnya sesuai pemeriksaan oleh BPK.
 - c. Indeks Penyerapan Anggaran APBD:
Indeks penyerapan anggaran APBD dengan target sebesar 17.14 (indek). Pencapaian sd triwulan II mencapai 4.44 (Indek) atau sebesar 25.93%. Indikator kinerja ini menghitung 9 rekening belanja yang sudah mencapai realisasi 80% dari target anggarannya.
3. **Meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah, dengan indikator sbb;**
 - a. Indeks Kemandirian keuangan.
Indeks kemandirian keuangan dengan target sebesar 13.00 (indek) per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar 15.52 (indek) atau sebesar 119%. Indikator ini menghitung perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan total dalam APBD.
 - b. Indeks Fleksibilitas Keuangan.
Indeks fleksibilitas keuangan dengan target sebesar 2.20 (indek) per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar 2.10 (indek) atau sebesar 95.30%. Indikator ini membandingkan penjumlahan pendapatan total dikurangi DAK dan dibagi dengan total kewajiban ditambah belanja pegawai.
 - c. Indeks Solvabilitas Layanan.
Indeks solvabilitas keuangan dengan target sebesar Rp. 2.200.000,- per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar Rp.2.301.247/org, atau sebesar 104.60 %. Indikator ini membandingkan jumlah total aset tetap dibagi jumlah total penduduk kabupaten Probolinggo.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) No : 100.3.4.3/2414/SE12024 tanggal 27 Mei 2025 hal Penyusunan Perubahan Rencana kerja pemerintah Daerah dan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2025. Adapun perubahan rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun 2025 tidak lepas dari perwal tentang penjabaran apbd ta. 2024. Adapun pertimbangan penyesuaian rencana kerja perubahan BPPKAD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Penyesuaian Anggaran Pagu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN .
2. Penyesuaian Anggaran Belanja Tidak Terduga (TT)
3. Penyesuaian Anggaran Pagu Belanja Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
4. Penyesuaian Anggaran Pagu Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Penyesuaian Anggaran Pagu Belanja Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
6. Penyesuaian Anggaran Pagu Belanja Pengelolaan Pendapatan Daerah

TABEL 3.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode rekening					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Catatan Penting
							Awal (Refocusing)	Perubahan (PAK)	Awal (Refocusing)	Perubahan (PAK)	
1					2				3	4	5
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp.548.301.473.252,00	Rp.553,568,958,693.70	5,267,48 5,441
5	0				KEUANGAN				Rp.548.301.473.252,00	Rp.553,568,958,693.70	
5	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	100 %	100 %	Rp26.960.770.417,00	Rp26.960.770.417,00	
5	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	100%	Rp415.213.266,00	Rp478.890.000,00	
5	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	7 dokumen	Rp402.683.266,00	Rp 454.860.000,00	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Cetak dokumen perencanaan 3. Peningkatan SDM 4. Pemeliharaan sarpras Gedung 5. Pemeliharaan
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	Rp8.450.000,00	Rp 16,950,000.00	
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Rp4.080.000,00	Rp 7,080,000.00	

5	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100 %	100%	Rp20.551.721.289,00	Rp 20,479,518,232,00
5	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org/bln	900 org/bln	Rp20.532.821.289,00	Rp. 22,015,029,740.70
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semester an SKP	12 laporan	12 laporan	Rp18.900.000,00	Rp18.900.000,00
5	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100%	Rp106.810.000,00	Rp 144.410.000,00
5	0	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 paket	90 paket	Rp69.300.000,00	Rp 69.300.000,00
5	0	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 org	107 org	Rp37.510.000,00	Rp 75,110,000.00
5	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	100%	Rp479.960.456,00	Rp 513.635.610,00

kendaraan dinas
6. Penyesuaian Gaji

5	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket		Rp14.987.400,00	Rp14.987.400,00
	2	1	0	0						
			6	0						
				1						
5	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 paket		Rp87.415.800,00	Rp 92,415,800.00
	2	1	0	0						
			6	0						
				2						
5	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket		Rp20.332.000,00	Rp20.332.000,00
	2	1	0	0						
			6	0						
				3						
5	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket		Rp43.900.000,00	Rp43.900.000,00
	2	1	0	0						
			6	0						
				4						
5	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	25 paket	Rp86.799.510,00	Rp 104,269,410.00
	2	1	0	0						
			6	0						
				5						
5	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 laporan		Rp34.440.000,00	Rp 45,640,000.00
	2	1	0	0						
			6	0						
				8						
5	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 laporan		Rp157.085.746,00	Rp157.085.745.35
	2	1	0	0						
			6	0						
				9						
5	0	0	2.	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00
	2	1	0	0						
			6	1						
				0						
5	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	100 %	Rp1.750.779.350,00	Rp 2.039.616.450,00
	2	1	0							
			7							

5	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1 unit	Rp280.000.000,00	Rp280.000.000,00
	2	1	0	0						
			7	1						
5	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	0 unit	Rp0,00	Rp0,00
	2	1	0	0						
			7	0						
				2						
5	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	47 unit	Rp588.020.100,00	Rp 676,106,100.00
	2	1	0	0						
			7	0						
				6						
5	0	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	594 unit	Rp882.759.250,00	Rp 1,083,510,350.000.00
	2	1	0	0						
			7	1						
				0						
5	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Rp2.620.510.156,00	Rp2.620.510.156,00
	2	1	0							
			8							
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	Rp27.752.800,00	Rp27.752.800,00
	2	1	0	0						
			8	0						
				1						
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Rp11.692.080,00	Rp11.692.080,00
	2	1	0	0						
			8	0						
				2						
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	12 laporan	Rp2.581.065.276,00	Rp2.584.957.276,00
	2	1	0	0						
			8	0						
				4						

5	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	100 %	100 %	Rp1.035.775.900,00	Rp1.258.775.900,00	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	63 unit	Rp626.120.000,00	Rp626.120.000,00	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	37 unit	Rp98.500.000,00	Rp 248,500,000.00	
5	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	446 unit	Rp86.155.900,00	Rp 139,155,900.00	
5	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	4 unit	Rp225.000.000,00	Rp 245.000.000,00	
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (dimensi 2, 3 dan 4 IPKD)	100 %	100 %	Rp516.143.595.860,00	Rp 518.443595.860	
5	0	0	2.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD (tepat waktu)	100 %	100 %	Rp851.415.590,00	Rp 1.051.415.590,00	
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Rp141.700.325,00	Rp171.231.075,00	

				1							
5	0 2	0 2	2. 0 1 2	0 0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Rp156.841.747,00	Rp 176.736.247,00	
5	0 2	0 2	2. 0 1 7	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	Rp245.982.638,00	Rp 305.403.138,00	
5	0 2	0 2	2. 0 1 0	0 0 0 9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 dokumen	4 dokumen	Rp119.646.630,00	Rp 190.108.880,00	
5	0 2	0 2	2. 0 1 9	0 0 0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 dokumen	5 dokumen	Rp187.244.250,00	Rp 207.936.250,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan APBD	94.2 %	94.2 %	Rp610.541.700,00	Rp 660.541.700,00	Pembuat an video tutorial pelayana n pengajua n SPP/SPM - Pengemb angan Aplikasi SIMPERD IN
5	0 2	0 2	2. 0 2 2	0 0 0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Rp67.303.500,00	Rp 99.162.500,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2 2	0 0 0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220 dokumen	220 dokumen	Rp22.640.400,00	Rp22.640.400,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2 7	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	“Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong	2 dokumen	2 dokumen	Rp62.533.000,00	Rp 45.925.0000,00	

					Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)”				
5	0 2	0 2	2. 0 2	0 0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	12 dokumen	Rp211.572.000,00	Rp 239.971.000,00
5	0 2	0 2	2. 0 2	0 0 1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 dokumen	3 dokumen	Rp80.220.200,00	Rp 130.220.200,00
5	0 2	0 2	2. 0 2	0 0 1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162 org	162 org	Rp166.272.600,00	Rp 122.622.600,00

5	0 2	0 2	2. 0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100 %	100 %	Rp664.887.570,00	Rp 714.887.570,00	
5	0 2	0 2	2. 0 3	0 0 3 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	87 dokumen	87 dokumen	Rp106.400.000,00	Rp 160,040,000.00	
5	0 2	0 2	2. 0 3	0 0 3 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	Rp178.029.500,00	Rp 143,729,500.00	
5	0 2	0 2	2. 0 3	0 0 3 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6 laporan	6 laporan	Rp123.434.570,00	Rp 154,094,570.00	
5	0 2	0 2	2. 0 3	0 0 3 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 dokumen	10 dokumen	Rp257.023.500,00	Rp257.023.500,00	
5	0 2	0 2	2. 0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100 %	100 %	Rp514.016.751.000,00	Rp516.016.751.000,00	1. Perubahan dana tidak terduga

5	0	0	2.	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325 laporan	69 laporan	Rp486.069.096.000,00	Rp486.069.096.000,00	
	2	2	0	0							
			4	8							
5	0	0	2.	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	8blaporan	Rp9.522.000.000,00	Rp 11,522,000,000.00	
	2	2	0	0							
			4	9							
5	0	0	2.	0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	2 laporan	Rp18.425.655.000,00	Rp18.425.655.000,00	
	2	2	0	0							
			4	1							
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Prosentase SKPD Yang Tertib Pengelolaan BMD Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	84 %	84 %	Rp2.544.573.475,00	Rp 2.744.573.475,00	
	2	3									
5	0	0	2.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Prosentase SKPD Yang Tertib Pengelolaan BMD Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	84 %	84 %	Rp2.544.573.475,00	Rp2.544.573.475,00	
	2	3	0								
			1								
5	0	0	2.	0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	Rp123.101.000,00	Rp123.101.000,00	1. Pengukuran tanah 2. Appraisal BMD 3. Narasumber BMD
	2	3	0	0							
			1	0							
5	0	0	2.	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87 dokumen	87 dokumen	Rp22.615.000,00	Rp22.615.000,00	
	2	3	0	0							
			1	0							
5	0	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	261 laporan	261 laporan	Rp562.768.125,00	Rp562.768.125,00	
	2	3	0	0							
			1	0							
			5								

5	0	0	2.	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87 laporan	87 laporan	Rp55.606.000,00	Rp 80,606,000.00	
5	0	0	2.	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 laporan	500 laporan	Rp1.089.984.350,00	Rp 1,139,984,350.00	
5	0	0	2.	0	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan	Rp560.952.500,00	Rp 660,952,500.00	
5	0	0	2.	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	6 dokumen	Rp129.546.500,00	Rp 154,546,500.00	
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1.4%	1.4%	Rp2.652.533.500,00	Rp 2.902.533.500,00	
5	0	0	2.		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1.4%	1.4%	Rp2.652.533.500,00	Rp 2.902.533.500,00	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	13 buah	13 buah	Rp507.722.000,00	Rp 500,872,000.00	1.Kajian database pajak
5	0	0	2.	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	504 laporan	504 laporan	Rp183.104.700,00	Rp 253,359,700.00	2.penyesuaian aturan pada script sismiop
5	0	0	2.	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	53 objek pajak	53 objek pajak	Rp284.057.400,00	Rp 437,647,400.00	3.Pemuta

					Bangunan (BPHTB						khiran basic data WP PBB
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5003 dokumen	5003 dokumen	Rp265.476.400,00	Rp 236,726,400.00	4.Web service payment pbb
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	13 layanan	180 layanan	Rp429.384.000,00	Rp 422,389,000.00	
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5003 dokumen	5003 dokumen	Rp73.050.000,00	Rp 62,800,000.00	
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	103 dokumen	103 dokumen	Rp727.190.000,00	Rp 810,010,000.00	
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48 laporan	48 laporan	Rp182.549.000,00	Rp 178,729,000.00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo ini disusun memperhatikan penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Perubahan memperhatikan program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan mengakomodir perubahan dari pemerintah pusat. Sehingga Perangkat Daerah akan tepat sasaran selaras menjalankan program kegiatannya dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan satu tahun kedepan.

Untuk mewujudkan pencapaian target dari indicator kinerja BPPKAD, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja Perubahan (Renja) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan Perangkat Daerah, dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

PROBOLINGGO, 02 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19730215 199302 2 002